

**EVALUASI KEBIJAKAN SANITASI AIR DALAM UPAYA PENYEDIAAN AIR  
BERSIH BAGI MASYARAKAT  
(Studi: Pada Desa Weekurra, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**Ali Hanafiah<sup>1</sup>, Moses Agustinus D.L<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Email: alihanafiah218@gmail.com

**Abstrak**

Pembangunan sanitasi air merupakan aspek penting dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, masalah sanitasi air semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan sanitasi air. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan fokus pada Desa Weekurra, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Sumba Barat Daya menyadari bahwa Desa Weekurra memiliki potensi sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi air dan meningkatkan akses terhadap air bersih yang memadai. Meskipun pelayanan sanitasi air tersedia di Desa Weekurra, warga masih harus menempuh jarak yang jauh (sekitar 1,3 km) dengan waktu sekitar 16 menit, melalui jalanan yang tidak memadai, untuk mendapatkan air bersih. Hal ini merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Faktor penghambat dalam penyediaan air bersih adalah ketidakmerataan distribusi, di mana beberapa wilayah belum merasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh antara sumber air dengan tempat tinggal warga, serta kurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur pipa dan penampungan air bagi setiap individu. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, beberapa saran diajukan, antara lain: kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyusun aturan yang mengatur sanitasi dan penyediaan air bersih, guna memastikan kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi dengan baik sebagai kebutuhan pokok manusia. Selain itu, diharapkan tersedia anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana seperti tangki penampungan dan sistem pipa sebagai upaya penyaluran air bersih bagi masyarakat di Desa Weekurra.

**Kata Kunci: Kebijakan Sanitasi Air, Upaya Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat.**

**Abstrack**

Water sanitation development is an important aspect in achieving public health and welfare in Indonesia. However, the problem of water sanitation is increasingly complex and difficult to solve. This study aims to evaluate water sanitation policies in an effort to provide clean water for the community, as well as analyze the factors that support and hinder the implementation of water sanitation policies. The research method used is descriptive, focusing on Weekurra Village, West Wewewa District, Southwest Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province. The Government of Southwest Sumba realizes that Weekurra Village has potential natural resources that can be used to meet water sanitation needs and increase access to adequate clean water. Although water sanitation services are available in Weekurra Village, residents still have to travel a long distance (about 1.3 km) with about 16 minutes, through inadequate roads, to get clean water. This is a worrying problem. An inhibiting factor in the provision of clean water is the uneven distribution, where some regions have not benefited. This is due to the long distance between water sources and residents' residences, as well as the lack of budget to build pipeline infrastructure and water reservoirs for each individual. Based on research findings, there are several problems that have not been solved.

Therefore, several suggestions were proposed, among others: cooperation between the Village Government and the Regency Government of South West Sumba to formulate regulations governing sanitation and the provision of clean water, to ensure the need for clean water can be fulfilled properly as a basic human need. In addition, it is expected that there will be sufficient budget to build facilities and infrastructure such as storage tanks and pipe systems as an effort to distribute clean water to the community in Weekurra Village.

**Keywords: water sanitation policy, efforts to provide clean water for the community.**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan sanitasi air di Indonesia merupakan salah satu fondasi mendasar untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan target-target berikut dibawah tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi bagi semua /*Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs)*, tetapi sebagian wilayah di Indonesia masih banyak yang mengalami persoalan terkait sanitasi, khususnya sanitasi air. Terutama perdesaan atau tempat terpencil yang belum bisa menikmati sanitasi air yang layak. Sehingga sanitasi air menjadi masalah dari tahun ke tahun semakin besar serta rumit untuk diatasi dantidak kunjung habis di Indonesia. Pada umumnya masyarakat Indonesia sangat merindukan akan sanitasi yang layak untuk menciptakan suatu keadaan yang efesensi secara menyeluruh baik itu penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan lainnya terutama bagi kesehatan masyarakat.

Sanitasi air bersih saat ini merupakan suatu kebutuhan pokokmasyarakat Indonesia, untuk memperoleh kesehatan dan mengurangi terjangkitnya penyakit yang tertular melalui air itu sendiri. Seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat Daya. Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan

maka pengelolaan air minum perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang Evaluasi Kebijakan Sanitasi Air dan dengan harapan adanya kontribusi berkelanjutan untuk meningkatkan penyediaan air bersih yang mana dapat diperoleh kualitas air bersih yang semestinya. Dengan adanya sanitasi air yang baik akan mengurangi penyakit melalui air yang berdampak pada kesehatan masyarakat, maka penulis mengambil judul penelitian tentang: Evaluasi Kebijakan Sanitasi Air Dalam Upaya Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai terhadap suatu kebijakan publik yang diimplementasikan (Suharno, 2013:219). Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan.

Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan, akan tetapi di perlukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh para elit politik atau Pemerintah yang kemudian untuk memberikan kritikan dan saran yang dapat membangun sehingga sistem yang tidak sesuai dengan prosedural dapat di ubah sedemikian rupa yang lebih baik.

### **Pengertian Evaluasi kebijakan publik**

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 2016).

Menurut Winarno (2014: 228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses

kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson dalam Sulistio 2012:52, Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri.

Sebuah evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan Pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebuah evaluasi

kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Dari pengertian evaluasi kebijakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

### **Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:

#### **a) Evaluasi Semu**

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan sendirinya oleh individu, kelompok, maupun masyarakat.

#### **b) Evaluasi Formal**

Evaluasi Formal adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa pencapaian dari tujuan yang telah diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan

mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang segera dilakukan setelah sebuah kebijakan selesai dilaksanakan yang telah ditetapkan jangka waktunya, baik itu jangka pendek maupun menengah. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang agar dapat terus memantau pencapaian target dan tujuan dari sebuah kebijakan.

#### **c) Evaluasi Keputusan Teoritis**

Evaluasi keputusan teoritis adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan.

Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan mengeksplisitkan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, baik itu yang nyata maupun tersembunyi. Sehingga individu maupun lembaga yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.

Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut. Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganalisis sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan

guna memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut.

Sedangkan analisis utilitas multi atribut adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. Analisis ini dapat menunjukkan secara eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para pelaku kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap dapat di menjadi acuan pula dengan metode-metode, hal tersebut menjadi langkah untuk dapat menjalankan sesuai dengan mekanisme dalam melakukan evaluasi sebuah kebijakan.

### **Tipe-Tipe Riset Evaluasi Kebijakan Publik**

Langbein dalam Widodo (2001:215) menyebutkan terdapat 2 (dua) tipe riset evaluasi (*type of evaluation research*) yaitu riset *process* dan riset *outcomes*, dan metodenya dibedakan menjadi 2 (dua) juga, yaitu metode *deskriptif* dan metode kausal. Riset yang memfokuskan pada proses, maka ia akan senantiasa mendasarkan pada *guide line*, yaitu tentang bagaimana prosedur dan administrasinya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Dengan kata lain, yang menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan dalam tipe riset ini adalah kesesuaian proses implementasi sebuah kebijakan publik melalui garis petunjuk yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa pertanyaan mendasar dalam riset evaluasi proses, di antaranya: apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan; apakah fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam kebijakan telah terpenuhi; bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan telah dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. Sedangkan riset evaluasi *outcomes* merupakan sebuah evaluasi yang berusaha melihat *outcomes* atau impact dari suatu program/kebijakan.

Henry dalam Wiyoto (2005:55-76) mengidentifikasi riset evaluasi ke dalam 7 (tujuh) tipe utama, yaitu:

- a) *Front-end Analyses* (evaluasi perencanaan program), merupakan riset evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah program baru ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.
- b) *Evaluability Assessment*, merupakan riset evaluasi yang dilakukan dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah program tersebut, serta menilai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) program dapat mencapai sasarnya.
- c) *Cost-Benefit and Cost-Effectiveness Analyses* (riset tentang efisiensi program), merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan outputs dan atau outcomes sebuah program, dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.
- d) *processor Implementation Evaluation*, merupakan riset evaluasi program dengan menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam suatu program.
- e) *Effectiveness, outcomes, or Impact Evaluation*, merupakan riset evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini

memfokuskan pada *output* dan *outcomes*.

- f) *Program and Problem Monitoring* (riset problem monitoring), merupakan tipe riset evaluasi yang memberikan informasi pada program dan problemnya, atau paling tidak tentang rekaman yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di dalam sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan.
- g) *Meta-Evaluation, Evaluation Syntheses or Comprehensive Evaluation*, merupakan tipe evaluasi yang berusaha menganalisis kembali temuan-temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah program/kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan evaluasi tidak hanya menyampaikan suatu ide dan gagasan akan tetapi dapat di perhatikan sesuai dengan prosedur yaitu temuan-temuan yang terjadi secara empiris di lapangan yang akan menjadi landasan yang kuat secara fakta dapat di akui dan dapat menjadi opsi mempunyai sasaran menjadi sehingga dapat memperoleh keputusan yang dapat di akui secara formal.

### **Sanitasi Air**

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *sanitation* yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Ehler dan Steel (2000) mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Sedangkan menurut Azwar (2000) mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai factor lingkungan yang mempengaruhi atau

mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Isnaini, 2014).

Sanitasi menurut *World health organization* (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (huda, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya sanitasi air dengan tujuan untuk mengawasi atau mengantisipasi penularan penyakit dari berbagai fator terutama dari sumber air atau lingkungan lain.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan memahami secara langsung realita sosial yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Sanitasi Air Dalam Upaya Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat.

Fokus penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat di Desa Weekurra, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian “Evaluasi Kebijakan Sanitasi Dalam Upaya Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat”. untuk saat ini masih sangat memperhatikan dikarenakan dengan keadaan desa serta kebutuhan masyarakatnya yang masih sulit diperoleh khususnya dalam konsumsian yang sehat dan air bersih yang layak diminum. Kondisi penyediaan air bersih saat ini sudah

dijalankan selama 2 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2019 dan ditahun 2020. Namun dengan demikian masih banyak faktor – faktor yang ditemukan sebagai penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaan evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat dalam desa Weekurra tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah belum adanya pemerataan dalam penyediaan air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Weekurra, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan anggaran yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Weekurra dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga belum adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang pentingnya penyediaan air bersih bagi masyarakat sebagai kebutuhan yang bersifat pokok.

Untuk itu masyarakat berharap adanya kontribusi berkelanjutan dari instansi yang mempunyai kewenangan terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kerja sama yang baik untuk meningkatkan penyediaan air bersih yang mana dapat diperoleh serta menikmati kualitas air bersih yang semestinya layak minum untuk warga desa atau masyarakat desa itu sendiri. Dan dengan adanya sanitasi air yang bersih dan baik maka akan dapat menguntungkan masyarakat dan mengurangi penyakit melalui air yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu besar harapan masyarakat dalam Desa Weekurra kepada Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan kerja sama yang baik dan dapat membuat aturan yang mengatur tentang Sanitasi Penyediaan Air Bersih sebagai Peraturan Desa agar kedepannya proses penyediaan air bersih di Desa Weekurra tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh

masyarakat pada umumnya dengan adanya penyediaan Pipanisasi dan juga Tandon sebagai penampung Air dan juga penyalur air bagi masyarakat yang tidak mudah menjangkau tempat penyediaan air bersih tersebut, yang dibatasi oleh jarak yang cukup jauh dari rumah ketempat sumber mata air.

Selain itu juga masyarakat berharap adanya anggaran atau dana yang cukup sehingga kebijakan tersebut dapat dibuat di beberapa titik mata air yang berada di Desa Weekurra sehingga dapat memudahkan masyarakat yang jauh dari tempat Sanitasi Air Bersih tersebut, agar berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan dan kebutuhan bersama akan air yang bersih dan layak diminum demi dan untuk kesehatan baik itu manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Untuk kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan akan air oleh masyarakat dalam Desa Weekurra. Berikut ini adalah gambar tempat penyediaan air bersih yang terdapat di Desa Weekurra sebagai suatu kebutuhan pokok masyarakat dalam desa.

## **PENUTUP**

**Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih banyak faktor-faktor yang ditemukan sebagai penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaan evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat dalam desa Weekurra tersebut.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam proses penyediaan air bersih untuk saat ini belum merata atau belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat pada umumnya yang berada dalam desa Weekurra dikarenakan jarak dari tempat penyediaan air ke rumah-rumah penduduk atau warga desa lain masih berjauhan atau berjarak jauh, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya

anggaran atau biaya untuk penyediaan pipanisasi dan penampung air bersih bagi setiap warga

3. Kampung yang tidak mudah menjangkau tempat tersebut, yang disebabkan oleh jarak yang cukup jauh dan sampai saat ini pun belum ada tindak lanjut atau kebijakan lain yang dilakukan atau yang diambil oleh pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan dalam menangani hal tersebut.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka ada beberapa permasalahan yang belum dipecahkan. Sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ditahun berikutnya diharapkan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan untuk menyusun aturan mengenai Sanitasi Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat agar kedepannya kebutuhan akan air bersih boleh terpenuhi dengan baik karena merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia
2. Diharapkan adanya anggaran atau dana yang cukup untuk penyediaan sarana dan prasarana seperti Tandon dan juga Pipanisasi sebagai penampung dan penyalur air bagi masyarakat dalam Desa Weekurra
3. Masyarakat berharap juga agar kedepannya Pemerintah dapat menambah Penyaluran Air di beberapa titik Mata Air agar pusat penyaluran mata air tersebut dapat dialirkan bagi setiap kampung di Desa Weekurra.
4. Masyarakat berharap agar jalan menuju tempat pengambilan air bersih dapat diperbaiki sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mengambil air ditempat Sanitasi tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Asmadi, Khayan, and Heru Subaris Kasjono. "Teknologi Pengolahan Air Minum." *Yogyakarta: Penerbit Gowsyen Publishing* 2011.
- Azwar. 2000. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Press.
- Azrul, Azwar. 2004. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Bina Rupa Aksara, Jakarta Kesehatan. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Chandra B 2012. *Pengantar kesehatan lingkungan*. Jakarta: ECG
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum. 2007. *Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Berbasis Masyarakat*
- Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ehler dan Steel. 2000. *Syarat-syarat Jamban Sehat yang Memenuhi Standar*. Jakarta
- Huda, N. 2016. *Sanitasi MTS Nuris Antrigo*. Available at <http://megaayup.web.unej.ac.id/>. diakses tanggal 5 Maret 2018
- Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

- Hakam, F. 2016. Analisis, Perancangan Dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Haryani, Eda. 2007. Studi Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Kota Semarang. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana, Semarang
- Hidayat, A. A. 2014. Metode penelitian keperawatan dan teknis analisis data. Jakarta: Salemba Medika
- Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isnaini, A. 2014. *Sanitasi lingkungan dalam Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara
- J. Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Kusuma Negara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Leo A gustino, 2008, Analisis Kebijakan Publik Bandung.
- Mega IM. 2010. Klasifikasi Tanah dan Kesesuaian Lahan. Bali (ID): Udayana Press
- Nugroho, Riant. 2011, Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Notoatmodjo. 2003. Metode Penelitian Teori dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notoatmojo S. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta; 2011
- Noor. Juliansyah, 2011, Metodologi Penelitian, Prenada Media Group, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian kuantitatif Edisi Revisi, Remaja, Rosdakarya, Bandung
- Patton dalam Moleong, 2010. Pengertian Teknis Analisis Data
- Pasolong, Harbani, 2014, Teori Administrasi Publik, Bandung, CV. ALFABETA, Cetakan Keenam.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air", BAPPEDAL 1991.
- Permenkes. 2009. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Riant, Nugroho, 2011, Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen kebijakan), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sinaga, Salam Rudi. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Bandung
- Sihite R. Sanitation & Hygiene. Surabaya: Penerbit SIC; 2000.

- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistio, E. B. 2012. Buku Ajar Studi Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Suryadmaja IB, Norken IN, Dharma S. 2015. Karakteristik Pola Pemakaian dan Pelayanan Air Bersih Di Wilayah PAM PT. Tirtaatha Buanamulia. Jurnal Spektran. 3(1): 21
- Tambunan RA.2013. Peran Pdam Dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum Sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum. Jurnal Ilmiah. 1(1):9.
- UNICEF-WHO-WB 2015. Levels and trends in child malnutrition: unicef-whothe world bank joint child malnutrition estimates. Key findings of the 2015 edition.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia
- Wiyoto, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Good Governance. Malang: Partner Consulting
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proes Dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS.
- WHO-UNICEF 2004, Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target: A Mid-Term Assessment of Progress, World Health Organization and United Nations Children's Fund.